

Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Modal Sosial

Saifuddin
Universitas Malikussaleh

Abstract: Definition of Social Capital among expert of Economics and expert of Social Science is different each other, however in general social capital has three main elements, those are: (1) Trust, (2) Norm and (3) Job network. The three elements can be used as an approach to measure the level of social capital in a region. Social capital can be differered into two dimensions; Structural and cognitive. Structural dimension see how process, quality and social interaction of society measured from its involvement in local association. Without social capital, active of economic development as well as construction will be difficult to realized. Social capital is not a single entity, but it is various entities which consist of some social structure aspects.

Keywords: economic, development, social capital

Percepatan pembangunan tidak hanya bergantung dari modal fisik saja namun juga dipengaruhi oleh modal non-fisik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*. Kalau kapital manusia dan kapital fisik kurang tersedia, maka kapital sosial (modal sosial) menjadi andalan utama untuk pembangunan (Lawang 2004). Sementara itu, Bourdieu (1985) menyatakan bahwa modal sosial (*social capital*) dan modal budaya (*cultural capital*) juga merupakan modal pembangunan yang memiliki peran yang sama pentingnya dengan modal ekonomi (*economic capital*).

Modal sosial yang dimiliki masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan. Tanpa modal sosial aktivitas pembangunan ekonomi dan juga pembangunan fisik akan sulit diwujudkan. Modal sosial selama ini relatif terabaikan dalam pelaksanaan pembangunan, padahal hasil-hasil penelitian yang dilakukan Putnam (1993), Grootaert (1999), Sabatini (2005) menunjukkan bahwa modal sosial memberi kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga, menekan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Alamat Korespondensi:

Saifuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Jl. Chik Ditiro No. 26 Lancang Garam Lhokseumawe, Tlp. (0645) 45006

Sejalan dengan uraian di atas sejak tahun 2006 BRR melalui Bidang Sosial, Budaya dan Agama telah melaksanakan pembangunan sosial masyarakat pedesaan berbasis gampong/kawasan yang diarahkan untuk menggunakan modal sosial masyarakat sebagai modal utama pembangunan ekonomi, sementara modal ekonomi (dana) bergulir yang diberikan kepada masyarakat secara individu/kelompok dan modal ekonomi berbasis aset adalah pendukung aktivitas pembangunan ekonomi masyarakat setempat.

Dana bergulir diperuntukkan bagi masyarakat miskin korban tsunami yang potensial untuk menjalankan usahanya, yang berjumlah Rp2.000.000,00/individu. Sementara dana untuk mengembangkan ekonomi berbasis aset diperuntukkan bagi desa-desa yang terkena tsunami, yang berjumlah Rp75.000.000,00/desa. Kedua dana tersebut dikelola oleh Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sudah dibentuk (BRR Regional II, 2007).

Program ini dalam pelaksanaannya didampingi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diseleksi oleh BRR. Program pembangunan sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan membangun masyarakat yang kuat pasca bencana agar mandiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Namun, realitas harapan tersebut belum dapat diwujudkan dengan baik. Di mana dana bergulir tidak berjalan sesuai dengan

harapan, dana yang diberikan kepada masyarakat (pengguna) tidak dikembalikan kepada LKM untuk selanjutnya diberikan kepada yang lainnya. Pengembaliannya hanya berlangsung selama fasilitator LSM berada di dalam masyarakat tersebut. Fenomena di atas kemungkinan diakibatkan oleh krisis modal sosial seperti krisis kepercayaan dan nilai repositas (gotong-royong) dalam masyarakat. Sehingga tidak merasa berkewajiban mengembalikan dana tersebut yang dapat dipergunakan oleh orang lain.

KONSEP MODAL SOSIAL

Konsep modal sosial memiliki pengertian yang berbeda-beda di kalangan pakar Ilmu Ekonomi dan pakar Ilmu Sosial. Masalah konsep kapital (modal dalam modal sosial) bersumber pada beberapa keterbatasan dan referensi. Konsep kapital dalam referensi ekonomi mempertimbangkan referensi bukan ekonomi, konsep kapital dalam referensi ilmu sosial terlalu sedikit mempertimbangkan referensi ekonomi, sehingga sulit untuk mencapai keseragaman pengertian. Modal sosial bukan sebuah entitas tunggal, tetapi berbagai macam entitas yang berbeda-beda dengan dua elemen bersama yang terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur itu.

Modal sosial adalah produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu yang dalam ketiadaannya akan tidak mungkin. Sebagaimana modal fisik dan modal manusia, modal sosial sama sekali tidak *fungible*, tetapi mungkin spesifik untuk aktivitas tertentu. Tidak seperti modal lain modal sosial melekat dalam struktur hubungan antar para pelaku dan di antara para pelaku. Walaupun definisi tersebut tidak begitu jelas, namun kumpulan tindakan, hasil dan hubungan yang berbeda ditetapkan sebagai modal sosial. Modal sosial juga dapat dilihat sebagai sekumpulan asosiasi diantara orang-orang yang mempengaruhi produktivitas komunitas yang mencakup jaringan dan norma sosial. Jaringan dan norma secara empirik saling berhubungan dan memiliki konsekuensi ekonomi yang penting. Modal sosial berperan di dalam memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk manfaat bersama bagi anggota-anggota asosiasi.

Paldam dalam Laba (2006), menggambarkan modal sosial sebagai perekat yang menyatukan masyarakat. Paldam membagi pendekatan teoritis

terhadap modal sosial kedalam kepercayaan, kerjasama dan jaringan. Kepercayaan memudahkan kerelaan untuk bekerjasama, hubungan yang sama juga berlaku antara kepercayaan dan jaringan. Dalam hal ini definisi dari jaringan akan bermakna ketika ditempatkan dalam kepercayaan-kerjasama.

Narayan (1999), memberikan definisi modal sosial sebagai norma dan hubungan sosial yang tertambat didalam struktur sosial masyarakat yang memungkinkan orang-orang untuk mengkoordinasikan tindakan dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan Portes (1996), mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan dari para pelaku untuk mendapatkan manfaat melalui keanggotaan di dalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya.

Selanjutnya, Bank Dunia mendefinisikan modal sosial dalam dua versi yaitu, modal sosial merupakan norma, institusi, dan hubungan sosial yang membentuk kualitas interaksi sosial di dalam masyarakat dan modal sosial adalah norma, institusi, dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerjasama (Bank Dunia 1998). Kedua definisi tersebut perbedaannya terletak pada variabel terikatnya. Definisi pertama kualitas interaksi sosial didalam masyarakat menjadi variabel terikat dan pada definisi yang kedua peluang orang untuk melakukan kerjasama sebagai variabel terikatnya.

Walaupun definisi modal sosial di kalangan pakar-pakar Ilmu Ekonomi dan pakar-pakar Ilmu Sosial berbeda-beda, akan tetapi secara umum modal sosial memiliki tiga unsur utama, yaitu; (1) Rasa percaya, (2) Norma dan (3) Jaringan kerja. Ketiga unsur utama tersebut dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat modal sosial di dalam suatu masyarakat.

KLASIFIKASI DAN DETERMINAN MODAL SOSIAL

Modal sosial dapat dibedakan dalam dua dimensi, yaitu dimensi struktural dan dimensi kognitif. Dimensi struktural bersumber dari peranan dan aturan dalam jaringan suatu organisasi sosial dan hubungan interpersonal, serta prosedur-prosedur dan presenden-presenden, yang didorong oleh faktor dinamis baik vertikal maupun horizontal. Dimensi kognitif bersumber dari norma-norma, nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan yang hidup di dalam masyarakat sipil oleh

dorongan kepercayaan, solidaritas, kerjasama dan persahabatan. Unsur modal sosial kognitif mempengaruhi/mengarahkan orang pada aksi kolektif yang menghasilkan manfaat bersama, sedangkan unsur-unsur struktural berperan di dalam memperlancar/memfasilitasi aksi kolektif itu. Dimensi-dimensi dari modal sosial struktural dan kognitif harus dikombinasikan untuk mewakili potensi agregat dari aksi kolektif yang mendatangkan manfaat bersama yang telah ada di dalam suatu komunitas.

Modal sosial juga dapat dinilai pada level mikro, meso, dan makro. Pada level mikro, modal sosial dapat terlihat dalam bentuk jaringan horizontal antara individu dan rumah tangga serta norma-norma yang mengatur hubungan itu dan nilai-nilai yang melandasi jaringan horizontal ini. Pengamatan modal sosial pada level meso mencakup hubungan horizontal dan vertikal di antara kelompok, diilustrasikan dengan pengelompokan asosiasi lokal menurut wilayah. Sedangkan pada level makro, modal sosial dapat diamati di dalam bentuk lingkungan kelembagaan dan politik yang mempengaruhi seluruh kegiatan ekonomi dan sosial, serta kualitas dari pengaturan pemerintah. Pada level makro, modal sosial berkaitan dengan ekonomi kelembagaan yaitu, kualitas insentif dan kelembagaan yang merupakan faktor penentu yang utama dari pertumbuhan ekonomi (Grootaert dan van Bastaeler, 2002).

Woolcock dan Narayan dalam Vipriyanti (2007), menyatakan bahwa ada empat perspektif modal sosial yaitu; (1) pandangan komunitarian (*the communitarian view*), pandangan ini menyamakan modal sosial dengan organisasi pada level lokal (seperti asosiasi, klub, dan kelompok-kelompok warga). Modal sosial diukur secara sangat sederhana yaitu, melalui jumlah dan kepadatan suatu organisasi dalam komunitas tertentu, semakin banyak akan lebih baik dan selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat, (2) pandangan jaringan (*the networks view*), menekankan pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal antar individu, dan hubungan di dalam organisasi dan antar organisasi seperti kelompok-kelompok komunitas dan perusahaan. Dalam pandangan ini terdapat dua dimensi dasar dari modal sosial pada level komunitas, yaitu yang dikenal dengan *bonding social capital (strong intra community ties)* dan *bridging social capital (weak extra community network)*. Perspektif ini menganggap

bahwa masyarakat dapat dicirikan oleh bawaan (*endowment*) mereka akan kedua dimensi modal sosial tersebut. Perbedaan kombinasi antar kedua dimensi akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari modal sosial, (3) pandangan kelembagaan (*the institutions view*), berpendapat bahwa jaringan kerja komunitas dan masyarakat sipil, secara luas adalah hasil dari keadaan politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Pandangan ini telah menghasilkan sejumlah metodologi dan fakta empiris yang kuat namun hanya untuk kebijakan makro, (4) pandangan sinergi (*the synergy view*), menggabungkan pandangan jaringan dan kelembagaan atas dasar asumsi bahwa tidak satupun pelaku pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat) akan dapat berjalan sendiri di dalam mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pretty dan Ward (2001), menyatakan bahwa modal sosial dibangun dari empat aspek, yaitu; (1) hubungan dari rasa percaya, (2) resiprositas dan pertukaran, (3) aturan umum, norma dan sanksi, (4) koneksi, kerjasama dan kelompok. Rasa percaya mempermudah kerjasama dan mengurangi biaya transaksi. Rasa percaya dapat dibedakan atas dua tipe yaitu, percaya terhadap individu yang dikenal dan percaya terhadap individu yang tidak dikenal yang semakin meningkat karena percaya pada struktur sosial yang dikenal. Membangun rasa saling percaya membutuhkan waktu, tetapi mudah sekali hilang. Ketika masyarakat tidak saling percaya maka kerjasama tidak akan terbangun. Resiprositas dan pertukaran juga meningkatkan kepercayaan.

Determinan modal sosial seperti jaringan kerja, norma dan rasa percaya mempengaruhi kinerja pembangunan desa. Jaringan kerja berpengaruh positif jika dampak proteksi terhadap perilaku *rent-seeking* lebih besar. Norma berdampak positif jika peluang berkembangnya kreativitas lebih besar dari peluang menipisnya etika dalam masyarakat. Rasa saling percaya akan mendorong peningkatan kinerja pembangunan bila mampu membangun kerjasama dan mengurangi konflik.

Untuk menentukan determinan dari modal sosial perlu memahami keputusan individu dalam melakukan investasi modal sosial. Modal sosial individu ditentukan oleh umur, mobilitas, jarak dan penghasilan dari tingkat keterampilan. Modal sosial individu ini berkaitan erat

dengan *human capital*. Ketika individu berinvestasi untuk dapat berkomunikasi secara baik maka individu tersebut meningkatkan modal sosial dirinya dan masyarakat. Akan tetapi, jika individu tersebut meningkatkan kemampuan dirinya untuk menipu orang lain maka dia meningkatkan modal sosialnya sendiri dan mengurangi modal sosial masyarakat (Glaeser, *et al.*, 2001). Determinan modal sosial juga dapat mencakup instabilitas ekonomi dan politik, hubungan *patron-client*, pendidikan, jenis pekerjaan, adanya *collective interest* dan legitimasi pasar bagi nilai-nilai bersama (*common value*). Selain itu, pungutan internal dan eksternal juga mempengaruhi terjalannya norma bersama dan jaringan kerja.

Tingkat modal sosial dalam suatu masyarakat dapat diukur dari indikator densitas keanggotaan dalam berbagai organisasi sosial, tingkat rasa saling percaya antara individu dalam masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas yang bersifat saling membantu (Putnam 1993). Perbedaan yang besar dalam keefektifan pemerintahan regional di Italia tidak disebabkan oleh sumberdaya yang dimiliki atau oleh strukturnya melainkan karena perbedaan dalam modal sosial wilayah tersebut. Hasil penelitian Putnam di Italia memperlihatkan kesuksesan Italia Utara karena kekayaan sosial dari kehidupan berkelompok, sebaliknya Italia Selatan mengalami kemunduran karena "*amoral familism*" seperti ketidakpercayaan yang dikombinasikan dengan ikatan kekeluargaan yang kuat. Namun demikian, ukuran tersebut masih sangat sederhana karena hanya melihat modal sosial dari kehidupan berkelompok saja.

Mengukur tingkat stok modal sosial masyarakat di suatu wilayah dapat dilakukan melalui pengukuran hasil (*outcome*) dari modal sosial itu sendiri. Hasil yang tercipta dari ketersediaan modal sosial yang umumnya digunakan sebagai indikator modal sosial dapat dikelompokkan dalam kelompok *proximal* indikator maupun *distal* indikator. *Proximal* indikator adalah hasil modal sosial yang berhubungan langsung dengan komponen inti dari jaringan kerjasama, rasa percaya dan resiprositas seperti penggunaan *civic engagement* sebagai indikator dari jaringan kerja sosial. *Distal* indikator adalah hasil tidak langsung dari modal sosial seperti indeks harapan hidup, status kesehatan, tingkat kriminalitas, tingkat partisipasi

dalam pendidikan, tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan rumah tangga (Vipriyanti 2007).

KEPERCAYAAN (*TRUST*)

Kepercayaan adalah rasa percaya yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk saling berhubungan. Ada tiga hal inti yang saling terkait dalam kepercayaan, yaitu: (1) *Hubungan* antara dua orang atau lebih. Termasuk dalam hubungan tersebut adalah institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh orang. Seseorang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, karena orang-orang dalam institusi itu bertindak. (2) *Harapan* yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang kalau direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak. (3) *Interaksi sosial* yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud. Dengan ketiga dasar tersebut kepercayaan dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial (Lawang 2004).

Percaya berarti seseorang memiliki kerelaan menerima segala risiko dalam hubungan-hubungan sosialnya berdasarkan pada keyakinan bahwa orang lain akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan dan bertindak saling menguntungkan. Percaya yaitu, menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak benar (Casson dan Godley, 2000).

Rasa percaya merupakan dasar dari perilaku moral di mana modal sosial dibangun. Moralitas mengarahkan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain. Sepanjang adanya rasa percaya, perilaku dan hubungan kekeluargaan maka akan terbangun prinsip-prinsip resiprositas dan pertukaran. Sebagai alat untuk membangun hubungan, rasa percaya dapat menekan biaya-biaya transaksi yang muncul dalam proses kontak, kontrak dan kontrol. Dengan demikian, semua orang tentunya akan lebih menyukai hubungan yang didasari oleh rasa saling percaya dibandingkan dengan hubungan yang oportunistik.

Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain semakin kuat juga kerjasama yang terjadi

diantara mereka. Kepercayaan sosial muncul dari hubungan yang bersumber pada norma resiprositas dan jaringan kerja dari keterkaitan warga negara. Dengan adanya rasa saling percaya, tidak dibutuhkan aktivitas monitoring terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan.

Kepercayaan dapat dibangun, akan tetapi dapat juga hancur. Demikian juga, kepercayaan tidak dapat ditumbuhkan oleh salah satu sumber saja, tetapi seringkali tumbuh berdasarkan pada hubungan teman dan keluarga. Rasa percaya ditentukan oleh homogenitas, komposisi populasi dan tingkat keberagaman. Rasa percaya yang tinggi ditemukan pada wilayah dengan ras dan komposisi populasi yang homogen serta tingkat keberagaman yang rendah.

Hasbullah (2006), menyatakan bahwa berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling percaya mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Ketiadaan rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang berbagai masalah sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki rasa saling percaya akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas dan partisipasi masyarakat untuk membangun bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang. Lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Jika rasa saling mempercayai sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku, kriminalitas akan meningkat, tindakan-tindakan destruktif dan anarkhis gampang mencuat, kekerasan dan kerusakan massa akan cepat tersulut. Kurangnya rasa saling percaya juga membuat masyarakat cenderung pasif, sendiri-sendiri dan pada akhirnya muncul perasaan keterisolasian diri. Pada situasi yang demikian masyarakat akan gampang terserang berbagai penyakit kejiwaan seperti kecemasan, putus asa, dan kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan yang fatal bagi dirinya maupun bagi orang lain.

JARINGAN (*NETWORK*)

Lenggono (2004) menjelaskan, pengertian jaringan mengacu pada hubungan sosial yang teratur, konsisten dan berlangsung lama, hubungan tersebut bukan hanya melibatkan dua individu, melainkan juga banyak individu. Hubungan antar individu tersebut akan membentuk jaringan sosial yang sekaligus merefleksikan terjadinya pengelompokan sosial dalam kehidupan masyarakat. Mitchell dalam Lenggono (2004) mengemukakan, bahwa jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus atau spesifik yang terbentuk di antara kelompok orang, karakteristik hubungan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menginterpretasikan motif-motif perilaku sosial dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sementara Suparlan (1995) mengemukakan, bahwa jaringan sosial merupakan proses pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang (sedikitnya tiga orang) yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri dan dihubungkan melalui hubungan sosial.

Jika individu mempunyai mobilitas diri yang tinggi untuk melakukan hubungan sosial yang lebih luas, ini berarti individu tersebut akan memasuki sejumlah pengelompokan dan kesatuan sosial sesuai dengan ruang, waktu, situasi dan kebutuhan atau tujuan yang hendak dicapainya. Keanggotaan individu dalam suatu jaringan bersifat fleksibel dan dinamis, karena pada dasarnya setiap individu sebagai makhluk sosial akan selalu terkait dengan jaringan sosial yang kompleks. Bila seorang individu memasuki sejumlah jaringan sosial yang berbeda-beda sesuai dengan konteks khusus atau fungsinya, ia akan merefleksikan struktur sosial yang berbeda pula. Struktur sosial bukan hanya pencerminan adanya keteraturan hubungan dalam suatu jaringan sosial, melainkan juga menjadi sarana untuk memahami batas-batas status dan peran, serta hak dan kewajiban individu yang terlibat dalam hubungan sosial tersebut.

Berdasarkan status sosial-ekonomi individu yang terlibat dalam suatu jaringan, terdapat dua jenis hubungan sosial, yaitu hubungan sosial yang bersifat horizontal dan vertikal. Hubungan yang bersifat horizontal terjadi jika individu yang terlibat di dalamnya memiliki status sosial-ekonomi yang relatif sama, dengan kewajiban dan sumberdaya yang dipertukarkan relatif sama. Sebaliknya, di dalam hubungan yang

bersifat vertikal individu-individu yang terlibat di dalamnya tidak memiliki status sosial-ekonomi yang sama atau sepadan.

Dasgupta dan Serageldin (2002), mengansumiskan bahwa setiap orang mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa harus memilih. Tetapi sesungguhnya, setiap orang memiliki pola tertentu dalam berinteraksi, melakukan pilihan dengan siapa berinteraksi dan dengan alasan tertentu. Jaringan kerja pada awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi (*system of communication channel*) untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal. Membangun saluran komunikasi ini membutuhkan biaya yang dikenal dengan biaya transaksi. Keinginan untuk bergabung dengan orang lain, sebagian disebabkan oleh adanya nilai-nilai bersama. Jaringan kerja juga berperan dalam membangun koalisi dan koordinasi. Secara umum dikatakan bahwa keputusan melakukan investasi dalam saluran tertentu disebabkan oleh adanya kontribusi saluran tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi individu.

Jaringan kerja menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan horizontal antar manusia dan hubungan inter dan antar asosiasi tersebut. Granovetter (1973), menyatakan bahwa ikatan inter masyarakat (*strong ties*) diperlukan untuk memberikan identitas pada keluarga dan masyarakat serta tujuan bersama. Pandangan ini juga menganggap bahwa tanpa ikatan antar masyarakat (*weak ties*) yang menghubungkan berbagai asosiasi sosial, maka ikatan horizontal yang kuat akan menjadi dasar untuk mewujudkan keinginan kelompok yang terbatas.

NORMA (*SHARE VALUE*)

Hasbullah (2006), mengartikan norma sebagai sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma-norma tersebut biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Aturan-aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis, tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

Lawang (2004), mengatakan norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Kalau struktur jaringan itu terbentuk karena pertukaran sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, sifat norma kurang lebih sebagai berikut:

- Norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan, artinya kalau pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Karena itu, norma yang muncul di sini, bukan sekali jadi melalui satu pertukaran saja. Norma muncul karena beberapa kali pertukaran yang saling menguntungkan dan ini dipegang terus-menerus menjadi sebuah kewajiban sosial yang harus dipelihara.
- Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Orang yang melanggar norma ini yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang sangat keras.
- Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan, dan akan melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras juga.

Rasa percaya ternyata dapat dibangun melalui mediasi pihak ketiga dan penyediaan ruang-ruang publik untuk melakukan aktivitas bersama. Namun hal yang terpenting adalah penciptaan pengelolaan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi.

MODAL SOSIAL STRUKTURAL

Komponen modal sosial struktural terdiri atas indikator *input* dan indikator *output*. Unsur-unsur pembentuk modal sosial struktural yang termasuk dalam indikator *input* yaitu keanggotaan di dalam jaringan dan asosiasi lokal yang meliputi kepadatan keanggotaan di dalam organisasi atau asosiasi, keragaman keanggotaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Indikator *input* merupakan komponen modal sosial yang dijadikan ukuran untuk mengukur proses interaksi sosial.

Interaksi sosial dalam kapital sosial sangat penting, karena kapital sosial itu selalu dilihat dalam

hubungannya dengan kegiatan bersama, kelompok atau jaringan, dimana interaksi sosial merupakan media yang paling utama. Interaksi sosial di dalam masyarakat dilihat dari adanya tindakan sosial yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama yang dibatasi oleh institusi tertentu sehingga nilai dan normanya jelas dan hubungan yang terkandung didalamnya jelas pula (Lawang, 2004).

Tingkat dukungan di dalam situasi krisis dan derajat tingkat keinklusiannya di dalam akses ke pelayanan (derajat pembatasan) merupakan indikator *output*-nya. Jika indikator *input* untuk mengukur proses interaksi sosial yang terjadi, maka indikator *output* adalah untuk mengukur kuantitas dan kualitas dari interaksi sosial tersebut. Asumsinya bahwa semakin tinggi derajat interaksi sosial, maka kuantitas dan kualitas interaksi sosial masyarakat sebagai *output* semakin tinggi pula.

Agama juga memiliki kedudukan sentral dalam memperlemah atau memperkuat dimensi modal sosial (Hasbullah 2006). Agama berguna dalam memperkaya dimensi spiritual dalam kehidupan, di mana agama memberikan inspirasi terhadap perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Agama juga mengajarkan masyarakat untuk menjunjung tinggi keadaban dan mengutamakan silaturahmi (*interaction*) antar individu, kelompok dan lingkungannya juga mengajarkan untuk tidak berprasangka jahat kepada orang lain. Dengan demikian, jelas keterlibatan masyarakat dalam asosiasi keagamaan akan memberikan dampak terhadap peningkatan modal sosial melalui jaringan (*Network*) dan kepercayaan (*trust*).

MODAL SOSIAL KOGNITIF

Dimensi struktural dari modal sosial yaitu, melihat bagaimana proses, kualitas dan kuantitas interaksi sosial masyarakat yang diukur dari keterlibatannya dalam asosiasi lokal. Tingkat kepadatan, keragaman keanggotaan dalam asosiasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses interaksi. dukungan dalam situasi krisis dan derajat pembatasan merupakan kualitas dan kuantitas interaksinya. Oleh karena itu, dimensi struktural memfasilitasi masyarakat untuk melakukan aksi kolektif (*output* dari modal sosial)

Berbeda dari dimensi struktural, dimensi kognitif dari modal sosial yaitu berfungsi dalam menggerakkan

dan menuntun aksi kolektif yang dilakukan masyarakat agar tercapai manfaat bersama. Indikator Pendekatan terhadap dimensi kognitif dari modal sosial adalah kepercayaan dan ketaatan atas norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pendekatan ini meliputi tiga indikator yaitu: kesetiakawanan, kepercayaan, kerjasama dan penyelesaian konflik.

PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS-MODAL SOSIAL

Pembangunan ekonomi berbasis modal sosial pernah diterapkan oleh satuan kerja Agama sosial dan Budaya Wilayah II BRR NAD- NIAS pada tahun 2007 dengan nama program "Bantuan Sosial Produktif", program ini dilaksanakan di 30 (tiga puluh) desa yang terbagi dalam tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun dan Kabupaten Pidie. Besar bantuan yang diterima oleh tiap-tiap kabupaten akan berbeda, Untuk lebih jelas mengenai lokasi bantuan tersebut dan jumlah yang diterima dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Satuan Kerja (Satker) Agama, Sosial, dan Budaya Wilayah II BRR NAD NIAS menyeleksi dan merekrut personil-personil yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Personil yang direkrut merupakan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang telah mempresentasikan konsep dan strategi pemberdayaan masyarakat di depan anggota Satker dan Tim Seleksi yang dibentuk oleh Satker tersebut. Untuk setiap desa sasaran ditempatkan dua personil sebagai fasilitator.

Setelah fasilitator direkrut, BRR melakukan Pengembangan Kapasitas fasilitator melalui *coaching*. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali pada awal pelaksanaan program pada bulan Agustus 2007. Yang pertama dilaksanakan di Banda Aceh. *Coaching* ini diikuti oleh satu orang fasilitator dari setiap desa. Yang kedua dilaksanakan di Wisma Bireun Jaya Kabupaten Bireun yang juga diikuti oleh fasilitator desa secara representatif. Diutamakan bagi fasilitator yang belum mengikuti *coaching* yang pertama. Tetapi kegiatan ini tidak lagi dibatasi bagi fasilitator saja, melainkan sudah diikutsertakan ketua LKM dari setiap desa.

Dalam melaksanakan pendampingan program sebagaimana dimaksud di atas, fasilitator yang

Tabel 1 Wilayah Penerima Bantuan Sosial Produktif

| No | Nama Desa | Kecamatan | Kabupaten | Besar Bantuan (Rp) |
|----|-------------------|--------------|------------|--------------------|
| 1 | Teupin Kuyun | Seunudon | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 2 | Ulee Reubek Barat | Seunudon | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 3 | Ulee Reubek Timu | Seunudon | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 4 | Lhook Puuk | Seunudon | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 5 | Sagoe | Seunudon | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 6 | Kuta Geulumpang | Samudera | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 7 | Kuta Krueng | Samudera | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 8 | Meucat | Samudera | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 9 | Puuk | Samudera | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 10 | Sawang | Samudera | Aceh Utara | 75.000.000,- |
| 11 | Cot Jaja | Simpang Tiga | Pidie | 75.000.000,- |
| 12 | Meunasah Lhe | Simpang Tiga | Pidie | 75.000.000,- |
| 13 | Pulo Gajah Mate | Simpang Tiga | Pidie | 75.000.000,- |
| 14 | Meunasah Kupula | Simpang Tiga | Pidie | 75.000.000,- |
| 15 | Mesjid Gigieng | Simpang Tiga | Pidie | 75.000.000,- |
| 16 | Jurong Teungoh | Jangka Buya | Pidie | 75.000.000,- |
| 17 | Jurong Binje | Jangka Buya | Pidie | 75.000.000,- |
| 18 | Jurong Ara | Jangka Buya | Pidie | 75.000.000,- |
| 19 | Gampong Cot | Jangka Buya | Pidie | 75.000.000,- |
| 20 | Kiran Baroh | Jangka Buya | Pidie | 75.000.000,- |
| 21 | Blang Rheum | Jeumpa | Bireuen | 200.000.000,- |
| 22 | Paloh Panyang | Jeumpa | Bireuen | 200.000.000,- |
| 23 | Seuneubok Lhong | Jeumpa | Bireuen | 200.000.000,- |
| 24 | Beurawang | Jeumpa | Bireuen | 200.000.000,- |
| 25 | Balang Adang | Jeumpa | Bireuen | 200.000.000,- |
| 26 | Krueng simpo | Juli | Bireuen | 200.000.000,- |
| 27 | Beunytot | Juli | Bireuen | 200.000.000,- |
| 28 | Blang Keutumba | Juli | Bireuen | 200.000.000,- |
| 29 | Juli Seupeung | Juli | Bireuen | 200.000.000,- |
| 30 | Paseh | Juli | Bireuen | 200.000.000,- |

(Sumber: Satker Agama, Sosial dan Budaya wilayah II BRR NAD NIAS, 2007)

ditugaskan di desa menggunakan pendekatan partisipatif-*Live in*. Dengan harapan fasilitator tersebut benar-benar menjadi mediator dan penggerak masyarakat miskin. Fasilitator dalam menjalankan tugasnya diberi fasilitas yang memadai, tempat tinggal, biaya konsumsi dan honor. Sementara metode pelaksanaannya adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA), penilaian/pengkajian terhadap keadaan atau kondisi sosial, budaya, dan ekonomi serta mengkaji permasalahan dan pemecahannya dengan melibatkan warga dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

Fasilitator di lapangan selain menggerakkan masyarakat juga mendampingi anggota Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) yang sudah terbentuk pada tahun 2006, yang memiliki tugas utama mengelola dana bergulir produktif yang telah disalurkan oleh BRR. Anggota LKM tersebut dipilih melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh fasilitator.

Dilihat dari strategi yang diterapkan oleh BRR dalam pelaksanaan program ini sudah sesuai dengan konsep perberdayaan yang banyak ditulis oleh para pakar. Di mana fasilitator yang rekrut oleh BRR telah menciptakan iklim demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Segala keputusan

yang berkaitan dengan pelaksanaan program diambil melalui musyawarah, sementara fasilitator hanya memfasilitasi pertemuan. Kemudian pembentukan dan penguatan kelompok atau organisasi secara modern pun sudah dilakukan oleh fasilitator, terutama pembentukan LKM yang memiliki kekuatan hukum, terdaftar pada notaris, dan pengurus LKM memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam mengelola LKM. Yang terkecual dalam hal ini adalah honor pengurus LKM yang sangat minim dan terbatas. Untuk menjaga kesinambungan LKM perlu dijalin kerjasama antar individu, lembaga/kelompok swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga ekonomi.

KESIMPULAN

Modal sosial memang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi tercapainya tingkat kesejahteraan dan pembangunan. Banyak faktor-faktor yang juga menjadi kendala utama seperti ketersediaan sumberdaya alam fisik serta sumber daya manusia. Salah satu alasan terjadinya kesenjangan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah di beberapa negara berkembang adalah ketiadaan modal sosial yang positif. Secara umum dinyatakan bahwa negara, wilayah dan komunitas dengan modal sosial yang lebih besar memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan modal sosial yang tepat akan meningkatkan akses setiap orang untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan, kesehatan, kenyamanan, perumahan dan kesempatan kerja sehingga kehidupannya akan lebih sejahtera. Modal sosial juga berpengaruh terhadap pembangunan yaitu, dalam membangun kembali ekonomi masyarakatnya. Kebijakan dan strategi yang ditetapkan pemerintah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali perekonomian Aceh melalui pembangunan yang berbasis modal sosial merupakan suatu hal yang perlu terus kita dukung.

DAFTAR RUJUKAN

- BRR NAD-NIAS Satker Agama, Sosial dan Budaya Wilayah II, 2007, *Laporan Tahunan Kegiatan Non Fisik*.
- Casson M, G.A. 2000. *Cultural Factors in Economic Growth*. Germany. Springer-Verlag Berlin-Heidelberg.
- Dadang, S. 2007. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Lokal*, <http://www.dadangsolihin.com>.
- Dasgupta, P., and Serageldin, I. 2002. *Social Capital: A Multi Faceted Perspective*. Washington DC: World Bank.
- Ife, J. 1995. *Community development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, Australia: Longman Pty Ltd.
- Ginandjar, K. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, <http://www.ginandjar.com>.
- Glaeser, E.L., and Laibson, D., Sacerdote, B. 2001. The economic approach to social capital. *Harvard Institute of Economic Research Discussion Paper Number 1916*. Harvard University Cambridge. Massachusetts. <http://post.economics.harvard.edu/hier/2001/papers/2001list.html>.
- Granovetter, M.S. 1973. The strength of weak ties. *American Journal of Sociology* 78:1360-80.
- Grotaert, C. 1999. Social capital household welfare and poverty in Indonesia. *Policy Research Working Paper No. 2148*. The World Bank Social Development Department.
- Grotaert, C. 2001. Does social capital help the poor? A synthesis of findings from the local level institutions studies in Bolivia, Burkina Faso and Indonesia. *Local Level Institutions Working Paper No. 10*, Social Development Department. Washington DC: World Bank.
- Grotaert, C., and van Bastelaer T. 2001. *Understanding and Measuring Social Capital: A multidisciplinary tool for practitioners*. Washington DC: The World Bank.
- Grotaert, C., and van Bastelaer T. 2002. *The Role of Social Capital in Development: An empirical assessment*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hasbullah, J. 2006. *Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press Jakarta.
- Laba, K. 2006. *Dampak Pemekaran Kabupaten terhadap Akumulasi Stok Modal Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pesisir: Kasus Wilayah Pesisir Teluk Lewoleba Kabupaten Lembata NTT (draft tesis)*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Lawang, R.M.Z. 2004. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI PRESS.

- Lenggono, P.S. 2004. Modal sosial dalam pengelolaan tambak: studi kasus pada komunitas petambak di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (tesis). Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Narayan, D. 1999. *Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty*. Property Group, Prem World Bank July 1999.
- Narayan, D., and Pritchett, L. 1999. *Cent and sociability: Household income and social capital in rural Tanzania*. *Economic Development and Cultural Change* 47(8): 871-986.
- Pranarka, A.M.W., dan Moeljarto, V. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Portes, A. 1996. *The New Second Generation*, Russell Sage Foundation.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Putnam, R.D. 1995. Bowling alone. America's declining social capital. *Journal of Democracy* 6(1): 65-78.
- Pretty, J. 2001. *Sustainable Agriculture and Food: Four Volume Set*, Earthscan.
- Sabatini, F. 2005. *The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical Perspective*. Department of Public Economics and SPES Development Studies Research Centre. University of Rome La Sapienza, and Department of Economics. University of Casino. <http://www.feem.it/feem/pub/publications/Wpapers/default.htm>.
- Soetrisno, L. 1997. *Kemiskinan, Perempuan, Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soelaiman, H. 1996. *Dinamika Cita-Cita, Pandangan, Konsep dan Pandangan tentang Kesejahteraan Sosial Cerminan dari Negara Industri Maju*. Jakarta: Baliitbang Kesos, Depsos. R.I.
- Vipriyanti, N.U. 2007. Analisis Keterkaitan Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi Wilayah: Studi Kasus di Empat Kabupaten di Bali (draft disertasi). Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- World Bank. 1998. *The Initiative on Defining Monitoring and Measuring Social Capital*. Overview and Program Description. Social Development Family. Environmentally and Socially Sustainable Development Network.